SISTEM REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI JAWA BARAT

Dede Anggy Reynaldin¹

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat”. Masalah dilapangan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya sistem rekrutmen dan kaderisasi yang di terapkan PKS di Jawa Barat, dilihat dari adanya penurunan presentase suara di pemilu legislatif Jawa Barat, sehingga peneliti mengambil faktor yang mempengaruhi proses pola kaderisasi menurut Harun yang diantaranya adalah pola kaderisasi, kelembagaan, kualitas dan waktu. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1).Bagaimana Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat?, (2). Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat?, (3).Upaya-upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci Ketua DPW PKS Jawa Barat, dan informan pendukung Ketua Badan Kaderisasi dan Kader PKS. Penentuan informan/narasumber dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sedangkan instrument utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan : (1). Pola rekrutmen dan kaderisasi belum terlaksana secara optimal sehingga perlu adanya pembaharuan dalam metode-metode rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera di Jawa Barat. (2). Peran lembaga kaderisasi yang ada di PKS yaitu melakukan rekrutmen anggota melalui gerakan dakwah di berbagai lapisan masyarakat dengan cara melakukan pendekatan secara intensif terhadap calon (3). Pentahapan dalam setiap agenda kaderisasi merupakan sebuah metode untuk meningkatkan kualitas calon kader PKS di Jawa Barat. (4). PKS menggunakan sistem per semester dalam setiap agenda rekrutmen dan kaderisasi. (5). Terdapat hambatan-hambatan yang ada di sistem rekrutmen dan kaderisasi PKS, (6). Upaya-upaya terus dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang ada

Kata Kunci : Rekrutmen dan kaderisasi

Abstract

This research entitled “the system of Recruitment and the prosperous justice party cadre recruitment in West Java”. The real problem in this research not yet optimal recruitment and cadre recruitment system which applied the PKS in West Java, as seem fro, the existence of a decrease in the percentage of the vote in legislative elections West Java, so the researchers took factors influencing the process of cadre recruitment patterns according to Harun who are institutional, cadre recruitment patterns, quality and time. As for the identification of the problem as follows : (1). How the system of recruitment and the Prosperous Justice Party cadre recruitment in West Java?, (2). What are the Factors that inhibit recruitment and cadre recruitment system in the Prosperous Justice Party in West Java?, (3). Any efforts to overcome barriers in the system of recruitment and the Prosperous Justice Party cadre recruitment in West Java? In this study, researchers used a descriptive research methods wit qualitative approaches. The techniquw of data collection was done through literature study, observation and interview key informants in depth with DPW PKS West Java, and the informants supporters chairman of cadre recruitment and PKS cadre. Determination of informants/purposive sampling done in a resource that is chosen with consideration and specific purpose. While the main instrument in the study are researchers themselves. Based on the result of the study showed : (1). Recruitment and cadre recruitment pattern have not been implemented optimally so that the need for renewal in the methods of recruitment and cadre recruitment conducted by the Prosperous Justice Party in West Java. (2) The role of the institutions existing in the PKS cadre recruitment namely recruitment of members through Dakwah movement in various walks of the life by means of an intensive approach towards prospective. (3). Phasing in any cadre recruitment agenda is a method to improve the quality of cadres of the the PKS candidate in West Java. (4). The PKS used the system semester in each recruitment agenda and cadre recruitment. (5). There are barriers that exist in the system of recruitment and the PKS cadre recruitment. (6). Efforts continue to be made to overcome existing barriers.

Keyword : *Recruitmen and cadre recruitmen*

PENDAHULUAN

Partai politik atau yang sering disebut juga dengan parpol merupakan ruang atau wadah bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini, parpol sudah sangat akrab di lingkungan masyarakat. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun belum cukup tua, partai politik dapat dikatakan sebuah organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda di

bandingkan dengan organisasi negara. Menurut Budiardjo (2008: 397), sebagai subjek penelitian ilmiah, parpol tergolong relatif muda. Baru pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimulai. Parpol pada awalnya lahir di negara-negara Eropa bagian barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka parpol telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak.

Dalam Budiardjo (2008:398) mengatakan Partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh Eksistensi parpol di Indonesia sebagai organisasi politik menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat peranannya, baik secara kualitas dan kuantitas. Sejalan dengan perkembangannya, parpol memerlukan sistem yang modern, sehingga menghasilkan organisasi politik yang bisa bertahan di kancah perpolitikan nasional yang serba penuh pertarungan sengit. Untuk menghasilkan parpol modern, maka diperlukan sistem kaderisasi yang mumpuni. Pada umumnya parpol juga diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsinya seperti di negara- negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Ia diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, memengaruhi keputusan- keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif ke masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat serta memasukkannya ke dalam proses membuat keputusan.

Parpol hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk

memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang diwujudkan melalui program- program yang disusun berdasarkan ideologi partai. Salah satu cara yang digunakan suatu parpol untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, parpol harus menyediakan kader-kader yang *qualified* untuk bertarung. Di sisi lain, parpol juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Oleh karena itu parpol memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak, kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat , dan di pihak lain pemerintah juga harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga- lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai atau tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Azhari (2014:6) menyebutkan bahwa “Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki parpol adalah fungsi rekrutmen politik”.

Rekrutmen politik merupakan seleksi, pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan di sistem politik dan sistem pemerintahan. Dalam rekrutmen politik, parpol

umumnya memiliki cara sendiri dalam perekrutan calon anggota. Menurut Gomes (1995: 105) mengatakan bahwa “rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi”.

Begitu pula dengan salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam sejarahnya, partai yang memiliki nama Partai Keadilan (PK) ini bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya, baik partai yang berbasis ideologis maupun yang non ideologis. Kelahiran partai keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berkepresidenan diantaranya mendirikan partai politik. Persoalan mendirikan partai adalah agenda yang hangat dibicarakan kalangan tarbiyah, sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik dan sebagian menyatakan tidak perlu.

PKS semakin dikenal masyarakat luas dengan apa yang dilakukan sebagai sebuah partai khususnya dalam masalah pengkaderan Partai ini terus mendidik kader kadernya menjadi kader yang solid bagi partainya. PKS sendiri merupakan sebuah partai yang memiliki kader yang sangat solid. Kader yang solid ini tidak lepas dari pemilihan dan seleksi ketat dalam merekrut calon anggota. Sistem perekrutan yang ketat ini melalui sistem manajemen Tarbiyah dengan menerapkan kurikulum dan materi yang di buat oleh orang orang Tarbiyah PKS. Tarbiyah PKS sendiri menyeleksi, meramu, dan kemudian mengembangkan sendiri dengan bimbingan seorang *murabbi*. Tarbiyah PKS juga mengadopsi pemikiran pemikiran tokoh tokoh melalui referensi referensi yang dipakainya.

Hasil dari perekrutan PKS ini akan bisa menghasilkan sebuah modul atau kurikulum untuk di pelajari oleh kader.

Aspek utama dalam jaringan Tarbiyah PKS adalah Masjid Kampus. Masjid kampus menjadi fokus kelembagaan jejaring sosial dan keagamaan jemaah Tarbiyah. LMD (Lembaga Mujahid Kampus) dan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) sendiri dijadikan wadah formal para aktivis dakwah melalui rekrutmen besar besaran pada mahasiswa baru. Terakhir jejaring sumber daya organisasi Tarbiyah memiliki hubungan dengan KAMMI. Pembentukan KAMMI dalam perjuangan menuntut reformasi menjadi tahap transformasi perjuangan jemaah Tarbiyah dalam menggunakan institusi yang lebih formal dan transparan untuk memperjuangkan cita cita sosial dan politiknya.

Sistem rekrutmen PKS dilakukan dengan dua cara yakni rekrutmen *fardi* dan *jama'i*. Rekrutmen *fardi* sendiri dilakukan oleh anggota Tarbiyah PKS terhadap beberapa orang melalui dakwah-dakwah yang dilakukan oleh kader di masjid-masjid atau ruang lainnya yang memungkinkan untuk melakukan dakwah. Setelah itu para kader melakukan pendekatan secara intens terhadap calon kader yang nantinya akan dinilai dari tingkat kemampuan dan kemauan dari calon kader untuk direkomendasikan mengikuti pola kaderisasi di PKS. Sedangkan rekrutmen *jama'i* yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan formal dan informal atau sering kita sebut perekrutan langsung ke partai seperti partai-partai lainnya. Caranya para calon kader mendaftarkan diri ke partai dari tingkatan DPRa sampai ke DPP PKS untuk selanjutnya mengikuti kaderisasi formal partai. Selain itu para calon kader bisa mengikuti agenda-

agenda yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sayap partai seperti lembaga dakwah sekolah maupun kampus, atau bisa mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh kader-kader PKS. Tapi disisi lain PKS melakukan rekrutmen anggota dari orang-orang yang berlatar belakang non-tarbiyah, baik itu muslim dan non muslim.

Secara terminologis, definisi kaderisasi adalah pencetakan, sedangkan definisi kader itu sendiri adalah orang-orang yang dipercaya mampu melanjutkan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi dengan kata lain, kaderisasi adalah proses, cara, atau perbuatan dalam usaha mendidik manusia yang memiliki kompetensi tinggi yang mapan untuk menjalankan suatu amanah.

Dalam pelaksanaannya, pola kaderisasi yang dilaksanakan PKS yaitu system pentahapan dengan melakukan proses pemberian materi sesuai jenjang yang ada. Penjenjangan ini merupakan sebuah upaya guna adanya pematangan pemahaman calon kader di setiap penjenjangannya. Penjenjangan yang ada di PKS yaitu kader pemula, muda, madya, dewasa dan ahli. Untuk bisa menjadi kader inti partai, semua kader harus sudah menyelesaikan penjenjangan tersebut yang nantinya akan direkomendasikan untuk menjadi kader inti partai. Setelah menjadi kader inti di partai, kader-kader tersebut memegang amanah dari partai dan amanah tersebut tidak boleh diingkari. Suatu kader bisa dikeluarkan dari partai apabila suatu kader melanggar peraturan, perjanjian, dan amanah yang sudah diberikan partai kepada kader tersebut. Kader-kader ini pun akan melanjutkan tujuan dan memegang tongkat estafet untuk memperjuangkan perjuangan PKS di kancah perpolitikan Indonesia. Bisa

kita lihat dari hasil Pemilu 2004, Partai ini berhasil meraih 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total suara dan berhasil mendudukkan 45 orang wakilnya di DPR. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKS 8.204.946 atau 7,88% dengan 57 kursi di parlemen. Sedangkan pada Pemilu 2014 memperoleh suara 8.480.204 atau 6,79% dengan penurunan jumlah kursi sebanyak 17 buah dari Pemilu sebelumnya. Ini menunjukkan sebuah peningkatan yang cukup signifikan dalam melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi oleh partai keadilan sejahtera.

Pada dasarnya rekrutmen dan kaderisasi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah organisasi termasuk partai politik, mengingat pola rekrutmen dan kaderisasi adalah bagian yang sangat menentukan umur sebuah partai politik. Sebuah partai politik hanya akan mampu bertahan dari berbagai tantangan dan perubahan zaman jika dapat melakukan regenerasi dengan baik. Pada dasarnya eksistensi partai tergantung pola kaderisasi yang bertujuan untuk menghasilkan kader-kader terbaik partai. Dalam rangka melakukan regenerasi yang baik sebagai terusan dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, maka mutlak untuk selanjutnya melakukan proses kaderisasi yang teratur dan berjenjang. Hal ini sejalan dengan pendapat Harun (2006: 94) yang menyatakan bahwa “Kaderisasi yang baik setidaknya memiliki beberapa jenjang yang diperuntukkan bagi para kadernya”. Klasifikasi jenjang kaderisasi menurut Rohayat Harun adalah jenjang pertama yang diperuntukkan bagi kader pemula, jenjang kedua yang diperuntukkan bagi kader madya dan jenjang ketiga yang diperuntukkan bagi calon-calon politisi. Kaderisasi merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik,

biasanya dilakukan dengan menanamkan sejumlah informasi politik yang dilakukan dengan sengaja kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini adalah kader partai. Informasi politik yang diberikan biasa berupa pengetahuan (*knowledge*) politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam pola kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik.

Di Jawa Barat sendiri pada hakikatnya, PKS melakukan proses perekrutan dan pengkaderan yang sama dengan PKS tingkat nasional. Tujuannya agar tercapainya visi dan misi partai mengenai pengkaderan PKS itu sendiri. Elektabilitas PKS bila melihat sumber daya manusia yang ada di wilayah Jawa Barat, di nilai cukup baik. Di eksekutif, Gubernur Jawa Barat sendiri merupakan kader dari PKS, ini mengindikasikan bahwa partai ini dikatakan berhasil dalam melakukan pengkaderan di tingkat provinsi dan sesuai dengan harapan dan tujuan pimpinan pusat. Namun bila melihat pada kenyataan, PKS ini mengalami penurunan dalam segi pemilih. Sebagai partai kader, harusnya PKS bisa mendulang suara di Jawa Barat lebih baik lagi melalui kader-kader yang dimilikinya. Bisa dilihat di pemilu legislatif Jawa Barat. PKS mengalami penurunan suara dan persentase pemilih di 3 periode ke belakang dalam pemilu legislatif. Semestinya ini menjadi sebuah peringatan bagi PKS dalam menjalankan sistem rekrutmen dan kaderisasinya, bilamana hasil pemilu legislatif yang menjadi acuannya. Jelas ini memperlihatkan kurang maksimalnya penerapan sistem rekrutmen dan kaderisasi sehingga tidak tercapainya harapan-harapan yang ditentukan partai dalam hal segi suara/pemilih.

Adapun data hasil pemilu legislatif yang didapat oleh Partai Keadilan

Sejahtera di tingkat provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perolehan Suara PKS di Pemilu Legislatif Jawa Barat

TAHUN	SUARA	PRESENTASI	JUMLAH KURSI
2004	2.407.982	12,37 %	14
2009	2.128.147	11,48%	13
2014	1.903.561	8,98%	12

Sumber : Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat

Dari table diatas, terlihat penurunan perolehan suara dari 3 periode dalam pemilu legislatif untuk suara PKS di Jawa Barat, hal ini diduga karena sistem pengkaderan dan rekrutmen di PKS tidak berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya penerapan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang masih belum sesuai dengan platform yang ada di partai keadilan sejahtera, sehingga mengakibatkan adanya penurunan kualitas kader dalam menunjang cita-cita partai. Indikasi yang terjadi saat ini adalah kurangnya pemahaman mengenai materi-materi yang ada dalam setiap jenjangnya, karena di PKS itu sendiri dalam pengimplementasian materi selalu harus bersentuhan dengan masyarakat, misalnya bahwa kader harus dekat dengan rakyat dengan cara mengisi materi dakwah di setiap kesempatan yang ada sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap individu dan partai. Namun pada kenyataanya pemahaman itu masih

kurang dipahami oleh kader. Sehingga jelas hal tersebut menjadi sebuah kendala yang menghasilkan penurunan elektabilitas partai melalui kader yang dimiliki.

2. Kurangnya tenaga murrabbi (guru/senior), sehingga menghambat pola kaderisasi serta rekrutmen yang ada dalam tubuh partai ini. Hal ini diakui oleh beberapa petinggi partai, bahwa saat ini yang menjadi hambatan terbesar adalah kekurangannya murrabi dalam setia pelaksanaan pengkaderan. Kualifikasi para guru menjadi sorotan utama PKS, ini diakibatkan oleh semangat membina dari para kader yang sudah memenuhi kualifikasi murrabi yang diterapkan PKS sehingga perlu adanya sebuah pembaharuan dalam penetapan kualifikasi yang akan berimbas kepada tercapainya penyampaian materi yang sesuai dengan tujuan materi.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Mely G. Tan (dalam Silalahi, 2010:28) “bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Sedangkan menurut Silalahi (2010:29) “mengatakan bahwa penelitian

deskriptif bisa digunakan baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (tidak berhipotesis) dan menguji hipotesis (berhipotesis)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membahas Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Di Jawa Barat, peneliti akan mencari jawabanya melalui pertanyaan- pertanyaan yang mengacu pada proses pola kaderisasi sebagaimana disampaikan oleh Rohayat Harun (2006: 94). Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas asumsi dan mempermudah pembahasan serta analisis dengan dimensi sebagai berikut :

1. Pola Kaderisasi

PKS telah eksis dalam perpolitikan di Indonesia, fungsi-fungsi yang dimainkan sebagai partai politik memberikan warna baru bagi politik Indonesia, diantara fungsi itu adalah sosialisasi politik, partisipasi politik dan rekrutmen politik. PKS adalah partai kader yaitu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai kekuatan utama. PKS sebagai partai dakwah dalam partisipasi politiknya berupaya mendakwahkan Islam dengan wadah partai dalam perpolitikan Indonesia, dan dalam upaya mentransformasi bangsa menuju bangsa yang adil dan sejahtera. PKS memiliki jaringan struktur yang sangat kuat di seluruh Indonesia, capaian struktur untuk provinsi DPW sudah di 33 Provinsi dan untuk di tingkat kabupaten 95% serta ditingkat DPC 75%. Jaringan ini merupakan kepanjangan tangan struktur di tingkat pusat yang di koordinasikan oleh wilayah dakwah DPP. Struktur PKS yang luas ini berasal dari para aktivis dakwah yang menyebar di seluruh Indonesia, para aktivis ini berasal dari kampus-kampus dan juga remaja masjid, serta dari para lulusan timur tengah yang bersentuhan dengan jaringan dakwah Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Kebanyakan jaringan ini terutama diluar pulau jawa masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, walaupun ada tapi masih sedikit di daerah pelosok pedesaan.

Namun dalam fungsi partai, rekrutmen politik tidak bisa dipisahkan dengan pola kaderisasi yang ada. Untuk seleksi dan pola rekrutmen kader PKS unik dalam perpolitikan Indonesia. Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau oleh murabbi (guru pembimbing) menggunakan metode Tarbiyah (pendikan) berkesinambungan dan terjadwal (halaqah). Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka. Rekrutmen yang dilakukan PKS bisa dikatakan cukup menarik, dimana penjangkaran calon kader melalui perekrutan itu sendiri biasanya menggunakan jalur dakwah, kader-kader yang ada saat ini melakukan berbagai manuver untuk melakukan penjangkaran tersebut. PKS menggunakan gerakan-gerakan bersifat struktural dan kultural, dimana para kader menyebarkan pemahaman tentang PKS ke seluruh lapisan masyarakat, ini merupakan langkah efektif untuk PKS bisa diterima di berbagai kalangan masyarakat.

Gerakan kultural merupakan gerakan dengan cara penyebaran kader ke berbagai lapisan masyarakat serta menggerakkan masyarakat dalam mentransformasi diri mereka sendiri. Sedangkan gerakan struktural adalah gerakan dengan melakukan persebaran kader di lembaga-lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislative, yudikatif maupun sector lain, dimana ini sangat memungkinkan untuk masyarakat lebih mengenal PKS secara lebih luas melalui kader-kader yang ada di kelembagaan pemerintah dan kader kader bisa lebih leluasa memahami orang-orang yang akan direkrut menjadi seorang anggota.

2. Kelembagaan

Lembaga kaderisasi merupakan representasi dari badan kaderisasi yang ada di DPW PKS Jawa Barat, dimana lembaga kaderisasi ini berbentuk lembaga kaderisasi yang ada di dalam struktural yang ada di setiap dewan pengurus di seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga kaderisasi ini lebih menitik beratkan kepada lembaga yang menjalankan program kaderisasi, padahal PKS bisa memanfaatkan organisasi underbow partai dan organisasi formal partai dalam melaksanakan proses kaderisasi non formal, dimana organisasi-organisasi yang ada di PKS lebih leluasa dalam keikutsertaan dalam menjalankan sistem rekrutmen dan kaderisasi PKS. Organisasi-organisasi underbrow PKS bisa mengembangkan pola pengkaderan sendiri sendiri. Organisasi-organisasi underbrow PKS seperti Garda Keadilan, Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia. (KAPMI) adalah organisasi yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. Selain kelompok kelompok yang secara formal bukan underbrow PKS namun berafiliasi secara ideologis ke partai ini, seperti ROHIS dan LDK juga mengembangkan pola pengkaderan yang khas. Contoh seperti ROHIS dikenal sebagai pengkaderan yang dinamai Latihan Dasar Kepemimpinan, sementara di LDK ada pembinaan bernama Kajian Rutin. Organisasi atau kelompok ini sangat solid, dan memiliki daya juang yang tinggi untuk berdakwah di lingkungan. Mereka pun sering melakukan gerakan-gerakan bantuan sosial jika ada musibah yang menimpa daerah-daerah di Indonesia.

3. Kualitas

Dalam pelaksanaan pola kaderisasi di PKS, tentunya di setiap pemberian materinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari para peserta kader. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas dalam sistem kaderisasi yang ada di PKS. Salah satunya dengan pembaharuan metode pembelajaran yang di terapkan dalam setiap

pelaksanaan agenda kaderisasi. Pembaharuan metode pembelajaran seharusnya dapat mengikuti perkembangan generalisasi. Pola pembinaan pun menjadi factor yang sangat penting agar dapat meningkatkan kualitas para peserta kader. Pembina dalam melaksanakan kaderisasi harus memiliki kualifikasi yang baik, agar di setiap pemberian materi yang ada dapat mudah dipahami oleh para peserta kader. Peneliti menilai dari hasil observasi bahwa evaluasi yang dilakukan tersebut harus disertai dengan beberapa perubahan atau perbaikan, salah satunya perubahan metode pembelajaran yang di terapkan dalam pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi, terutama dalam pelaksanaan kaderisasi, dimana perlu adanya perubahan metode belajar dari sisi materi dan gaya pembelajaran, terlebih partai ini merupakan partai yang menjuluki dirinya sebagai partai anak muda, maksud peneliti adalah dengan pesatnya pertumbuhan generalisasi, partai keadilan sejahtera harusnya mampu untuk mengejar pertumbuhan tersebut, ini akan memberikan setidaknya refreshment dalam segi kualitas peembelajaran. Yang menjadi permasalahan lainnya adalah tentang lembaga kaderisasi dan murrabi (pembimbing) dalam melaksanakan pembelajaran dan pemberian materi. Saat ini dari hasil observasi yang dilakukan, gerakan-gerakan yang berawal dari lembaga kaderisasi ataupun organisasi formal partai sedikit menurun dalam memerankan fungsinya di lapangan, terlihat dari menurunnya organisasi dakwah kampus atau rohis yang saat ini mulai tenggelam, ini mengindikasikan, semakin harinya kualitas kader atau organ-organ di dalam partai mengalami penurunan secara kualitaas, maka perlu adanya sebuah titik balik yang dilakukan oleh partai dengan pembenahan-pembenahan yang menjadi kendala.

Lalu hasil observasi di lapangan yang selanjutnya, yang menjadi kendala saat ini adalah kemampuan setiap daerah dalam melaksanakan pola kaderisasi, mengingat masih banyak DPD PKS di daerah yang sangat sulit melaksanakan kaderisasi , sehingga akan menghambat potensi-potensi yang dimiliki oleh kader di daerah yang tidak mampu melaksanakan kaderisasi, berbagai upaya telah dilakukan oleh pengurus yang ada di wilayah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa DPW PKS Jawa Barat sangat

memperhatikan penyelenggaraan proses kaderisasi di setiap daerah dengan berupaya memfasilitasi proses kaderisasi dengan cara penggabungan, namun hal tersebut harus menjadi sorotan bagi pengurus wilayah tentang ketidak mampuan satu daerah melaksanakan pola kaderisas yang dikhawatirkan akan menghambat pengembangan potensi kader-kader di daerah. Hal ini harus segera diselesaikan permasalahannya, karena kekhawatiran yang terjadi adalah kemampuan untuk memberikan transfer knowledge about party akan semakin berkurang, dengan tidak terselesaikannya masalah kemampuan beberapa daerah yang tidak mampu melaksanakan proses kaderisasi, hal yang menjadi analisa peneliti adalah, kader- kader ini harus diberdayakan secara maksimal, agar kualitas yang dimiliki oleh para kader yang ada bisa digunakan dengan baik melalui pendistribusian kader yang memiliki potensi baik ke setiap daerah yang tidak mampu melaksanakan.

4.Waktu

Alokasi waktu menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi, dimana alokasi waktu ini merupakan sebuah ruang yang harus di maksimalkan agar tujuan dari rekrutmen dan kaderisasi ini bisa tercapai. Saat ini PKS menggunakan sistem periodik atau hitungan per semester dalam pelaksanaanya. Alokasi waktu yang ada harus dimanfaatkan dengan baik, karena dengan sistem penjenjangan, waktu ini dianggap paling penting, karena di setiap semesternya harus dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi. Hasil observasi dilapangan, bila melihat dari pola kaderisasi yang dilakukan melalui kajian rutin perpekan, sangat memunkinkan tujuan partai dalam penyampaian materi bisa tersampaikan sepenuhnya, terlebih kelompok halaqoh dalam satu pertemuan memiliki tingkat intensitas yang tinggi, namun tergantung cara penyampaian dari setiap pembimbing yang melakukan kaderisasi tersebut agar dapat menyerap kepada para calon kader dan bagaimana metode pembelajaran yang dibawa bisa menyesuaikan kondisi kelompok halaqah tersebut. Namun perlu ada pengkajian kembali mengenai alokasi waktu ini, mengingat banyak

komponen yang harus menunjang waktu tersebut dengan penggunaan sistem penjenjangan, salah satu nya adalah kualifikasi guru dan transfer knowledge mengenai materi-materi yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat yang dalam pelaksanaan berjalan dengan baik namun dalam metode-metode dan kualitas dari hasil rekrutmen dan kaderisasi belum memperlihatkan progress yang baik sehingga mengakibatkan turun nya kepercayaan masyarakat yang ditunjukan oleh hasil suara dan presentase PKS di Jawa Barat. Maka dari itu berikut adalah kesimpulan penjelasan dari dimensi yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Pola Kaderisasi merupakan dimensi dimana hal ini menjadi pokok dan acuan pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi di PKS Jawa Barat. Pola kaderisasi yang dilakukan PKS bersifat penjenjangan. Rekrutmen politik PKS untuk calon anggota legislatif dan calon kepala daerah menggunakan sistem “semi terbuka”.
2. Kelembagaan, merupakan daya dukung dalam pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi. Tujuan pembentukan lembaga-lembaga ini adalah penjangkaran dan pemantapan kualitas calon kader untuk partai melalui kegiatan-kegiatannya.
3. Kualitas, adanya sistem rekrutmen yang merupakan tahap penjangkaran calon kader yang ingin mengembangkan diri di ranah partai politik yang dilakukan oleh PKS di Jawa Barat. Tujuan mekanisme penjenjangan bertujuan untuk memfokuskan pola pengkaderan.
4. Waktu, PKS menggunakan system per semester dalam setiap agenda rekrutmen dan kaderisasi. Pertimbangan penentuan waktu ini bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi.

Faktor-faktor yang menghambat dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi PKS di Jawa Barat merupakan hambatan yang merujuk kepada faktor

pendukung pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi PKS di Jawa Barat. Upaya yang dilakukan oleh partai terhadap hambatan yang ada dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi PKS di Jawa Barat terus menerus dilakukan agar hambatan-hambatan yang ada bisa diselesaikan dengan apa yang saat ini diupayakan oleh partai melalui pembenahan sistem dan pelaksanaan.

REKOMENDASI

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas mengenai sistem rekrutmen dan kaderisasi partai keadilan sejahtera di jawa barat, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sebuah pembaharuan dalam sistem rekrutmen dan metode pembelajaran dalam sistem kaderisasi supaya mampu mengejar pertumbuhan generalisasi.
2. Optimalisasi kelembagaan partai dalam melaksanakan pola rekrutmen dan kaderisasi dalam melakukan tugasnya.
3. Perlu adanya sebuah pembinaan berkelanjutan kepada kader yang telah menempuh semua proses penjenjangan yang ditetapkan oleh partai
4. Mengkaji kembali mengenai penetapan waktu dalam agenda rekrutmen dan kaderisasi di PKS karena pola penjenjangan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
5. Percepatan proses pembenahan sistem harus segera dilakukan sebagai bentuk pengupayaan meminimalisir hambatan-hambatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2002, *Kriminologi*, Restu Agung. Jakarta
- Affandi, Idrus. 2009. *Bedah Buku Political Education* dari Robert Brownhil dan Patricia Smart. Kencana Utama. Bandung
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

_____. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

_____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.rev.ed.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

_____. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.rev.ed.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Cholisin dkk. 2007. *Ilmu Kewarganegaraan*. Universitas Terbuka. Jakarta
Cholisin, 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

Gaffar, Afan.1999. *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Gomes, Faustino Cardoso, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Andy Offset. Yogyakarta

Haris, Syamsuddin. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI. Jakarta

Harun,Rochajat & Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Mandar Madju. Bandung

Haryanto, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; *Mengenal Teori-Teori Politik*. Cetakan I November 2005. Depok

Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Huntington, Samuel P. (2001).*Gelombang Demokrasi Ketiga*, : Penerbit Grafiti Jakarta.

Moleong, Prof.DR. Lexy J, M.A. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta

Pito, Andrianus, dkk. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: PT Nuansa

Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Jakarta
Stradling. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013*

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA. Bandung
Suharno. 2004. *Sosiologi politik*. Diktat. Yogyakarta

Surbakti, Ramlan. 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta

Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung

_____, 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Mandar Madju. Bandung